

# **Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Bakung**

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi  
Publik



Oleh :

Rihhadatul Aisy 2216041132

Dosen Pengampu : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

2023

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yaitu pakaian, rumah dan makanan. Saat mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut terkadang manusia secara tidak sadar menghasilkan sampah setelah memakai dan mengkonsumsinya. Sampai sekarang sampah masih menjadi permasalahan utama terutama di kota-kota besar. Pada dasarnya, sampah yang tidak dikelola dengan baik serta kebijakan pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat mempengaruhi lingkungan hidup.

Selain itu dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, jika pengelolaan sampah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak adanya buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan tersebut bisa berupa sampah padat ataupun limbah cair yang merupakan hasil aktivitas baik dari pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya.

Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudradjat (2008:6) menyatakan bahwa permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbunan sampah sepanjang 2022. Pada 2022 Jawa Tengah menjadi penghasil sampah terbesar, yakni

mencapai 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyusul dengan total timbulan sampah masing-masing 3,11 juta ton, 1,63 juta ton dan 1,11 juta ton. Adapun menurut KLHK, sebanyak 9,06 juta ton timbulan sampah nasional berhasil ditangani sepanjang 2022. Kemudian 5,05 juta ton timbulan sampah berhasil dikurangi pada tahun 2021 lalu.

Kemampuan pemerintah dalam menangani sampah pada provinsi-provinsi berkategori besar di Indonesia masih terbatas dan belum maksimal. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air dan tanah serta meningkatkan potensi banjir. Oleh karena itu masalah persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis operasional dan manajemen yang tepat serta terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing.

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk perkotaan di Lampung, adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Pada berita media cetak dan media online menyebutkan bahwa minimnya fasilitas penampungan sampah di Bandar Lampung, membuat banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Selain itu, beberapa sungai di Bandar Lampung seperti Way Kedaton, Way Penengahan, Wai Awi, dan Way Gintung dihiasi berbagai jenis sampah, khususnya sampah rumah tangga, menumpuk di tepian sungai yang mengering di tengah musim kemarau.

Volume sampah domestik di Kota Bandar Lampung setiap harinya di tahun 2022 meningkat dibanding pada tahun 2021 lalu. Volume sampah per hari di Bandar Lampung tahun 2022 sudah 1.000 ton per hari meningkat dari tahun 2021 yang hanya 850 ton per hari. Berdasarkan pada data tersebut, berarti volume sampah di Kota Bandar Lampung bertambah kira-kira 100 ton per hari. Jika tidak ada tindakan nyata pada level masing-masing pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk peduli sampah, maka persoalan sampah akan menjadi bencana bagi kota ini.

Pada kasus yang lain, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPA yang ada di kota Bandar Lampung dan hanya satu – satunya di kota tapis berseri terletak di kelurahan Bakung kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung dengan luas tanah 14 Ha, dan sudah beroperasi sejak tahun 1994 oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat dimana sampah dikelola untuk dimusnahkan baik dengan cara penimbunan dengan tanah secara berkala (sanitary landfill),

pembakaran tertutup (insenerasi), pemadatan dan lain lain. Proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan dari sampah padat (solid waste) dan sampah yang dihasilkan dari dalam kota atau dari daerah nonkota, telah menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan oleh mereka yang terlibat dalam manajemen pengelolaan sampah. Manajemen pengelolaan persampahan harus memberikan alternatif solusi yang terbaik seperti metode manajemen sampah padat yang berkelanjutan (sustainable solid waste management) yakni suatu solusi yang lebih efisien, secara teknik tepat, dan secara sosial dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 183,77 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.209.940 jiwa (berdasarkan data tahun 2023). Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Semakin berkembangnya kota Bandar Lampung maka makin meningkat pula jumlah sampah yang terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. sekitar 800 ton/hari dengan menggunakan 15 armada truk, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan teknologi open dumping sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem sanitary landfill.

Dalam hal ini Penanganan permasalahan sampah tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarkan suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetika), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya (Aswar, 1986). Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulang, atau

pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam, praktek pengelolaan sampah di setiap sector, antara Negara maju dan Negara Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurang koordinasi antar instansi yang menangani permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal tersebut penting diketahui agar dapat mencari solusi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat. Dalam kaitan itulah keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang tak dapat terpisahkan dengan peranan pemerintah karena merekalah sumber penghasil sampah. Salah satu bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif dari masyarakat serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung kegiatan tata kelola persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung juga belum dapat berjalan secara maksimal. Sejak pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan hingga beralih ke Dinas Lingkungan Hidup saat ini, khususnya dalam mengatasi volume sampah yang ada di wilayah kota Bandar Lampung yang tiap harinya meningkat hingga mencapai  $\pm 10.000$  ton pertahun. Secara faktual, pilihan untuk menjadikan peran pemerintah penting dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sampah sebagai fokus dalam penelitian ini adalah bahwa hampir tidak ada penanganan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ditujukan untuk lebih menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti hingga dapat menentukan penyelesaian masalah yang tepat serta mencapai tujuan penelitian. Berdasar latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung?
2. Faktor- faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.
2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.

b. Membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji, memahami serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung

c. Memperluas pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di TPA Bakung

## Sumber Referensi :

- Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019). Kajian evaluasi TPA Dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah di TPA (Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(2), 85–100. <https://doi.org/10.5614/j.tl.2019.25.2.6>
- Iryani, D. A. (2019). Karakterisasi Dan estimasi emisi gas rumah Kaca Dari Sampah Padat Kota Di TPA Bakung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 218–228. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.218-228>
- Sujatmiko, C., Juwita, F., & Wisnaningsih, W. (2022). Pengelolaan sampah rumah tangga bagi warga di kelurahan Bakung Kota Bandar lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(02), 104–113. <https://doi.org/10.24967/jams.v3i02.1954>
- Purnomo, C. W. (2020). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Gadjah Mada University Press.
- Suyasa, W. B., & Mahendra, M. S. (2016). *Evaluasi Dan perencanaan Pengelolaan sampah perkotaan*. Udayana University Press.
- Qodriyatun, S. N. (2014). *Sampah: Permasalahan Dan Pengelolaannya*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.